

**PANDANGAN MAHASISWA AKTIVIS TERHADAP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN
2019**

**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Aktivis Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya)

SKRIPSI



Oleh :

AKMAL HAMDAN RUSYDI

I01216004

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

Pernyataan Pertanggung Jawaban Penulisan Skripsi

Bismillahirrohmannirrohim.

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Akmal Hamdan Rusydi

NIM : I01216004

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 19 tahun 2019 Tentang Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil karya dari kekayaan berpikir penulis, apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sebagai penulis bersedia memperoleh kensekuensi hukum berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 21 Januari 2021



Akmal Hamdan Rusydi.

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Akmal Hamdan Rusydi
Nim : I01216004
Program Studi : IlmuPolitik
Fakultas : IlmuSosialdanIlmuPolitik
Judul Skripsi : **“Pandangan Mahasiswa Aktivist Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**. Pembimbing berpendapat bahwa hasil karya ilmiah tersebut sudah dapat diajukan untuk diuji dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana S.Sos didalam bidang Ilmu Politik

Surabaya, 09 Februari 2021

Dosen Pembimbing



Moch. Ilyas Rolis. S.Ag., M.Si

NIP: 197704182011011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Akmal Hamdan Rusydi dengan Judul “**PANDANGAN MAHASISWA AKTIVIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).**” Telah dipertahankan dan dinyatakan lulus didepan Tim Penguji Skripsi tanggal 09 Februari 2021.

TIMPENGUJISKRIPSI

Penguji I



Moch. Ilyas Rolis.
S.Ag, M.Si

NIP:19770418201101100

7

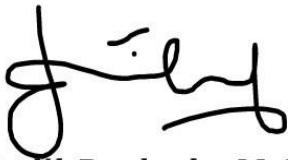
Penguji II



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar,
S.Ag, M.Si

NIP: 197803152003121004

Penguji III



Laili Bariroh, M.Si

NIP:

197711032009122002

Penguji IV



Holilah, S.Ag, M.Si

NIP: 197610182008012008

Surabaya, 09 Februari 2021

Disahkan

Universitas IslamNegeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip, SEA, M.Phil, Ph.D

NIP:197402091998031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akmal Hamdan Rusydi.
NIM : I01216004.
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik.
E-mail address : akmalhamdan42@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pandangan Mahasiswa Aktivistis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juni 2024

Penulis

(Akmal Hamdan Rusydi)

ABSTRAK

Akmal Hamdan Rusydi, 2021. PANDANGAN MAHASISWA AKTIVIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI (studi kasus Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Pandangan Mahasiswa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis dalam melihat aksi besar demonstran mahasiswa se-Indonesia khususnya di kota Surabaya berkaitan dengan penolakan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1). bagaimana independensi lembaga komisi pemberantasan korupsi setelah pemberlakuan uu no 19 tahun 2019 menurut aktifis mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, (2) bagaimana efektifitas kinerja lembaga komisi pemberantasan korupsi setelah pemberlakuan uu no 19 tahun 2019 menurut aktifis mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk dapat menjawab pertanyaan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Independensi, Efektivitas, Kinerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menilai bahwa perubahan Undang-Undang ini akan membawa perubahan terhadap independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini diawasi oleh badan Eksekutif melalui kebijakan Dewan Pengawas yang masuk dalam ranah kinerja KPK seperti memberikan atau tidak memberikan izin untuk penyadapan, pengeledahan, dan penangkapan, yang seharusnya menjadi hak wilayah pengawasannya jika merujuk pada Undang-Undang yang lama yaitu Nomor 30 Tahun 2002 dimana KPK begitu leluasa dalam mengawasi kinerja Instansi Pelayanan Publik. Serta kinerja KPK tidak begitu efektif dikarenakan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, pengeledahan dan penangkapan dan kegiatan tersebut menurut pandangan mahasiswa aktivis justru malah mengulur waktu dan terkesan memberikan kesempatan kepada para pelaku korupsi untuk menghilangkan barang bukti. Para aktivis juga menilai skeptis akan kinerja KPK pasca perubahan kedua UU tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN	II
MOTO.....	III
PERSEMBAHAN	IV
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
Daftar Isi.....	IX
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual	8
1. Pandangan.....	8
2. Kebijakan Publik.....	9
3. Implementasi.....	10
4. Kinerja	11
5. Efektivitas	12
BAB II : KAJIAN TEORITIK.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Edward III	24

a. Komunikasi	24
b. Sumber Daya.....	25
c. Disposisi.....	25
d. Struktur Birokasi	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3. Informan Penelitian	28
4. Teknik Pengumpulan Data	30
a. Teknik Observasi.....	30
b. Teknik Wawancara	31
5. Teknik Analisis Data	31
a. Reduksi Data	32
b. Penyajian Data	33
c. Penarikan atau Kesimpulan.....	34
6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
B. Sistematika Pembahasan.....	35
C. Jadwal Penelitian	36
D. Daftar Wawancara	37
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Gambaran Umum Kota Surabaya	38
B. Luas Wilayah	41
C. Batasan-Batasan Wilayah	41
D. VISI-MISI Kota Surabaya	41
E. Kondisi Administratif	43
F. Sarana-Prasarana.....	43
G. Latar Belakang Sejarah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.....	44

H. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Fakultas-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	47
I. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	50
J. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.....	51
K. Struktur Organisasi Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.....	52
L. Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 19 Tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Korupsi	52
M. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72
A. Dokumentasi Penelitian	72
B. Dokumentasi Sertifikat Turnitin.....	74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

Buku:

- Wicipto setiadi, *korupsi di indonsia (penyebab, bahaya, hambatan, dan upaya pemberantasan serta regulasi*: Jakarta Selatan, 2014.
- Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*: Bandung, 2007
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*: Jakarta ,2004
- Suyadi prawirosentono, *kebijakan kinerja karyawan*: Yogyakarta, 1999
- Drs, H, Malayu Hasibuan, *manajemen sumber daya manusia*: Jakarta, 2012
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, 2001
- Efendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*: Jakarta, 2012
- Asrul nurdin,“*Implementasi kebijakan peraturan daerah no 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dikota Makassar*”: Makassar, 2013
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*: Yogyakarta, 2005
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*: Jakarta, 2013
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*: Jakarta, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*: Bandung, 2014

Jurnal:

Fitria, *eksistensi komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga negara penunjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pdf*. Hal-1 10663-ID-eksistensi-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-negara-penunjang-dal.pdf

BAB II KAJIAN TEORI, A. KONSEP DASAR TENTANG PERSEPSI 1...

<http://eprints.uny.ac.id>> ...PDF

Dian fitriani afifah, Neneng yani yuningsih, *Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di kabupaten cianjur*, Cosmogov, Vol. 2 No. 2 Oktober 2016

Tria Adhinta Indra Jayusman, Agus Widiyarta, *Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswanggi Kecamatan Sukodono Sidoarjo*, Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN Veteran Jatim, Vol. 7 No. 2 Oktober 2017

Ni Wayan Budiani, *Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial Input, Vol. 2 No. 1

Akib Haedar, *"Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana"*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2019

Sumber Lain:

Amran Ibrahim, 4 Kasus Mega Korupsi, 3 diantaranya PDIP Perjuangan,

kompasiana.com,

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/amrani-brahim/5ca6e6efcc528378c239f362/4-kasus-mega-korupsi-pdi-perjuangan-3-diantaranya>

Sahistya Dhanes, 5 fakta kasus besar era SBY, seret 30 nama pejabat,

AKURAT.CO,

<https://www.google.com/amp/s/m.akurat.co/315337/5-fakta-kasus-besar-era-sby-seret-30-nama-pejabat>

Ziaulhaq, *Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa*. Hal. 1-2

[http://www.academia.edu/1177553/Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa](http://www.academia.edu/1177553/Tugas_dan_Tanggung_Jawab_Mahasiswa)

<http://m.cnnindonesia.com>, kemenkumham: revisi UU KPK jadi UU No. 19 tahun

2019

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A